

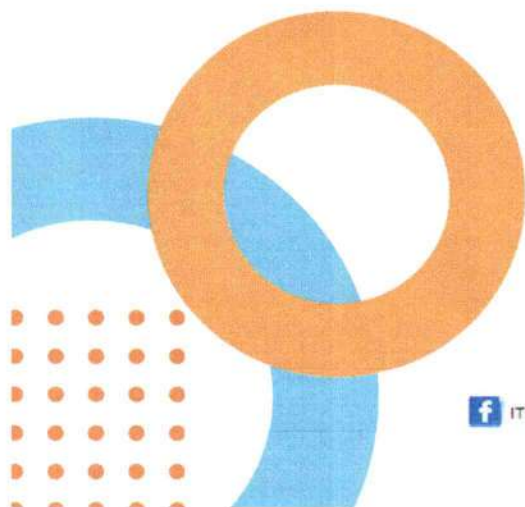


INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO



RENCANA KERJA

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja Tahun 2025 Inspektorat Kota Sawahlunto telah dapat disusun dengan baik.

Rencana Kerja Rencana Kerja Tahun 2025 Inspektorat Kota Sawahlunto disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2025 Inspektorat Kota Sawahlunto.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta berperan aktif dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Inspektorat Kota Sawahlunto ini. Mudah-mudahan Rencana Kerja ini bisa memberikan manfaat yang baik bagi aparatur pelaksana pada Rencana Kerja Tahun 2025 Inspektorat Kota Sawahlunto.

Sawahlunto, Maret 2024
Inspektur Kota Sawahlunto

ISNEDI, SE
Nip. 19641215 199003 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistimetika Rencana Kerja	3
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Resntra	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	15
2.3 Isu-isu Penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT	18
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	18
3.2 Program dan Kegiatan	21
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	22
BAB V PENUTUP	71
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pagu Anggaran menurut Jenis Belanja	7
Tabel 2.2	Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	8
Tabel 2.3	Realisasi Capaian Program dan anggaran Program	8
Tabel 2.4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023	9
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Sawahlunto	14
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju tahun 2026	23



BAB I
PENDAHULUAN**1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – PD) Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2025 merupakan dokumen rencana pembangunan PD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2025 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh aparatur di Inspektorat Kota Sawahlunto dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan baik.

Sebagai suatu dokumen perencanaan, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – PD) Tahun 2025 memuat Rencana Program dan Kegiatan Prioritas untuk mencapai sasaran yang diinginkan pada tahun 2025. Prioritas pembangunan daerah didasarkan pada pertimbangan dan acuan :

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan sesuai tema pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
2. Bersifat penting dan mendesak untuk dilaksanakan
3. Bersifat realitis dan dapat dilaksanakan
4. Merupakan tugas dan kewenangan pemerintah daerah
5. Program dan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali

- terakhir Nomor 11 Tahun 2020 terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagi Daerah dengan Masa Kerja Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026;
13. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 52 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Sawahlunto (Berita Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 52).

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Kota Sawahlunto adalah sebagai dokumen perencanaan Inspektorat Kota Sawahlunto untuk periode 1 tahun .

Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Kota Sawahlunto adalah untuk menjabarkan tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

1.3. SISTEMATIKA RENCANA KERJA

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Renja

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 1.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
Mencakup uraian dan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu, serta kemajuan yang telah dicapai atas target kinerja yang

diharapkan menurut Renstra masing-masing PD, mengetahui kendala dan tingkat pemanfaatan potensi yang ada serta menentukan langkah-langkah atau kebijakan yang diperlukan pada Rencana Kerja Tahun 2025

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Memaparkan kajian capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Memuat penjelasan terhadap permasalahan aktual / penting yang dihadapi masyarakat sesuai kewenangan PD masing-masing, beserta dampak dan peluang yang dimiliki PD serta rekomendasi kebijakan program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat.

Memaparkan kajian penyusunan Renja dengan usulan-usulan desa/kelurahan, kecamatan, PD lain maupun pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan Inspektorat Kota Sawahlunto yang disampaikan melalui forum PD.

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Menyajikan telaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas, pokok dan fungsi PD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi PD dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Termasuk didalamnya penjelasan mengenai capaian pelaksanaan program dan kegiatan baik yang sesuai dengan target, melebihi target maupun yang tidak sesuai dengan target.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan rumusan rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 Sumber Dana APBD.

BAB IV Penutup

Berisikan catatan penting penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja PD, kaidah-kaidah pelaksanaan serta tindak lanjutnya.



BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan PD Tahun Lalu dan Realisasi Renstra mencakup uraian dan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Renja tahun lalu dengan renstra masing-masing PD.

Kegiatan Inspektorat Kota Sawahlunto pada tahun 2023 terdiri dari 8 kegiatan, 18 sub kegiatan dengan 3 Program dengan Jumlah Anggaran Perubahan Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Kota Sawahlunto adalah 6.944.981.210,- (enam milyar sembilan ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah), terdiri dari belanja operasi (belanja pegawai dan belanja barang jasa) sebesar Rp. 6.906.339.164,- (enam milyar sembilan ratus enam juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu seratus enam puluh empat rupiah),- dan belanja modal sebesar Rp. 38.642.046 ,- (tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu empat puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 2.1

Pagu Anggaran menurut Jenis Belanja
Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2023

No.	Jenis Belanja	Pagu	
		Awal	Perubahan
1.	Belanja Daerah	7.459.193.306	6.944.981.210
1	Belanja Operasi	7.423.769.785	6.906.339.164
	1.1. Belanja Pegawai	6.376.740.441	5.901.750.952
	1.2. Belanja Barang Dan Jasa	1.047.029.344	1.004.588.212
2	Belanja Modal	35.423.521	38.642.046
	2.1. Belanja Moda Peralatan dan Mesin	35.423.521	38.642.046
	2.2. Belanja Moda Asset Tetap Lainnya		

Secara keseluruhan, anggaran perubahan Inspektorat Kota Sawahlunto mengalami penurunan dari APBD awal sebesar Rp. 514.212.096,- dibandingkan sebelum perubahan yang berjumlah Rp. 7.459.193.306,- (Tujuh milyar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam rupiah), terdiri dari belanja operasi (belanja pegawai dan belanja barang jasa) sebesar Rp. 6.944.981.210,- (enam milyar sembilan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah)- dan belanja modal sebesar Rp. 35.423.521,- (Tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).. Penurunan anggaran ini terjadi karena adanya pengurangan dan penambahan anggaran pada beberapa sub kegiatan.

Selanjutnya dilihat dari realisasi belanja menurut jenis belanja sebesar 96,02% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2

Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Pagu		Realisasi	
		Awal	Perubahan	Rp.	%
1.	Belanja Daerah	7.459.193.306	6.944.981.210	6.053.873.885	87,17
1	Belanja Operasi	7.423.769.785	6.906.339.164	6.019.536.385	87,16
	1.1. Belanja Pegawai	6.376.740.441	5.901.750.952	5.299.336.544	89,79
	1.2. Belanja Barang Dan Jasa	1.047.029.344	1.004.588.212	720.199.841	71,69
2	Belanja Modal	35.423.521	38.642.046	34.337.500	88,86
	2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.423.521	38.642.046	34.337.500	88,86
	2.2. Belanja Moda Asset Tetap Lainnya	-	-	-	-

Pada belanja operasi terealisasi sebesar 87.16% dan belanja modal sebesar 88.86%. Untuk Fisik program dapat mencapai target karena adanya peran aktif seluruh pegawai dan PPTK dan adanya kontrol yang baik dari pimpinan. Untuk kisaran rata-rata capaian per program antara 63,54% sampai dengan 87,44% dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Realisasi Capaian Program dan Anggaran Program

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.811.692.960	5.956.453.470	87.44%
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	76.326.350	61.229.215	80.22%
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	56.961.900	36.191.200	63,54%
	JUMLAH	6.944.981.210	6.053.873.885	87,17%

Untuk Fisik program dapat mencapai target karena adanya peran aktif seluruh pegawai dan PPTK dan adanya pembinaan dan pengawasan yang baik dari pimpinan.

Rincian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Rencana kerja 2023 dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut :

Tabel 2.4

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD s/d TAHUN 2023
INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO

No Kode Urusan	Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Keluaran Kegiatan (sesuai Renstra)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2023 (tahun n-2)			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2024 (n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	realisasi capaian	tingkat capaian (%)
1		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
1	Program Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terasiliasi ususan Pemerintahan Daerah pada OPD Pengawasan	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan OPD	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang	41 orang	42	42	100.00%	42	100.00%
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemertikan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi Kepegawaian	46 orang	31 orang	17	42	247.06%	42	100.00%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29 orang	15 orang	17	42	247.06%	42	100.00%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	4 paket, 50 Laporan	4 paket, 50 Laporan	15 paket, 40 Laporan	4 paket, 50 Laporan	100.00%	4 paket, 50 Laporan	100.00%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	4	4	100.00%	1	100.00%
	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	19	19	100.00%	1	100.00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	4	4	100.00%	1	100.00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggunaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	4	4	100.00%	1	100.00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 Laporan	40 Laporan	40	52	130.00%	50	100.00%

Rencana Kerja Tahun 2025



Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penambahan peralatan dan mesin	15 unit	2 Unit	2 unit	2 Unit	100.00%	15 unit	100.00%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	12 unit	2 Unit	4	4	100.00%	-	-
	- Laptop	-	-	-	-	-	-	-
	- PC	-	-	-	-	-	-	-
	- Printer	1 unit	1 Unit	4	4	100.00%	-	-
	- AC 1 PK	1 unit	-	-	-	-	-	-
	- AC 2 PK	1 unit	-	-	-	-	-	-
	- TV	-	-	-	-	-	-	-
	- Dispenser	1 unit	-	-	-	-	-	-
	- Kursi	2 unit	-	-	-	-	-	-
	- Meja	2 unit	-	-	-	-	-	-
	- Vertikal blind	8m	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	3 Unit	-	-	-	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	2 Unit	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi/nya fasilitas kebutuhan jasa kantor	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	100.00%	48 Laporan	100.00%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	12 Laporan	100.00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	12 Laporan	100.00%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	12 Laporan	100.00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	12 Laporan	100.00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	44 unit	16 Unit	27	27	100.00%	44 unit	100.00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	-	11	11	100.00%	14 unit	100.00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 unit	15 unit	15	15	100.00%	25 unit	100.00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 Unit	1	1	100.00%	1 unit	100.00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 unit	-	-	-	-	-	-
Program Penyelenggaraan Pengawasan	% pengawasan terlaksana sesuai PKPT	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%

Rencana Kerja Tahun 2025



	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pengawasan yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	150 LHP	152 LHP	121	160	132.23%	150 LHP	100.00%
	Pengawasan Keuangan Pemda	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Reviu Laporan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Pengawasan desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Kerja sama pengawasan internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terdentuk	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	2 Dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	100.00%	2 Dokumen	100.00%
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan Tertentu yang dilaksanakan (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Penanganan Penyelesaian Keuangan Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Keuangan Negara/Daerah yang Ditangani	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase peningkatan Skor IPAK (%)	3.60	3.34%	3.34%	3.34%	100.00%	3.60	100.00
	Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Persentase Rekomendasi Kebijakan yang disusun	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	4	4	100.00%	2 Rekomendasi	100.00
	Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Perumusan Kebijakan teknis di Bidang fasilitasi pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Rencana Kerja Tahun 2025



Pendampingan dan Asistensi	Persetase peningkatan Skor IPAK (%)									
	Meningkatnya Indeks PMPRB PD									
	Meningkatnya % Intervensi Pencegahan Korupsi terintegrasi Pemerintah Kota Sawahlunto									
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah									
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2 PD	2 PD	2 PD	2 PD	2 PD	2 PD	2 PD	2 PD	2 PD	100.00%

Terhadap Renstra OPD, dari 5 sasaran strategis dan 5 indikator kinerja sasaran yang dilaksanakan di tahun 2023, menunjukkan bahwa 4 indikator kinerja telah tercapai dan 1 indikator belum tercapai target, dengan hasil capaian indikator kinerja sasaran dalam sebagai berikut:



Faktor pendukung dan penghambat tercapainya target indikator kinerja sebagai berikut:

FAKTOR PENDUKUNG

- o Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan pengawasan untuk mendorong program pemerintah *delivered*.
- o Peningkatan dukungan anggaran pengawasan terutama untuk peningkatan SDM aparat pengawasan
- o Hubungan yang baik dengan stakeholder terkait
- o Hubungan yang baik dengan mitra

FAKTOR PENGHAMBAT

- o Monitoring capaian kinerja baru sebatas output
- o Belum optimalnya SDM aparat pengawasan
- o Terlambatnya penyampaian laporan hasil pengawasan oleh tim
- o Perangkat daerah belum menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan

Rincian target dan realisasi capaian sasaran strategis sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota sawahlunto

No	Indikator	SPM/Standar Nasional (tahun)	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (tahun n-2)	Tahun 2023	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	Tahun 2022 (tahun n-2)	Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Level PK AP/PP	-	-	3	3	3	3	2	3	203.770.480	1.247.741.000		
2	Persentase OPD SAKIP A	-	-	8.00%	12.00%	50.00%	75.00%	0.00%	0.00%	50.000.000	234.787.150		
3	Persentase OPD RTP Level 3			100.00%	72.00%	Level 3	Level 3	100.00%	72.00%	50.728.750	245.033.050		
4	Skor IE/PPK			n/a	2.7	Level 3	Level 3	n/a	1.1	124.999.800	427.772.000		
5	Persentase Realisasi Anggaran dan Laporan	-	-	n/a	95%	95%	95%	n/a	92.00%	48.872.480	36.888.000		
				n/a	95%	100%	100%	n/a	100.00%				

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah salah satu agenda pemerintah pusat dan daerah yang sedang gencar dilaksanakan sekarang ini, berbagai regulasi telah dikeluarkan dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, diharapkan dalam penyempurnaan berbagai ketentuan dan peraturan ini penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan akan semakin terbuka, akuntabel, efektif, efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, membuka partisipasi masyarakat, keserasian dan keterpaduan tugas pokok dan fungsi pemerintahan.

Dalam rangka menunjang kebutuhan untuk menjadi lembaga APIP yang akuntabel maka menjadi agenda utama bagi Inspektorat Daerah untuk meningkatkan kapabilitasnya. Dalam hal ini sesuai dengan target nasional maka Inspektorat Daerah Kota Sawahlunto telah mencapai level 3 pada tahun 2023.

Kemudian untuk menjamin pelaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien maka perlu penjaminan akan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dalam hal ini sesuai target Inspektorat Daerah Kota Sawahlunto maka pada tahun 2025 Pemerintah Kota Sawahlunto baru mencapai Level 2.

Good governance tak terlepas dari adanya sistem dan prosedur yang jelas dalam hal pengawasan dan penanganan pengaduan masyarakat sebagai penanda (*whistle blower system*), yang menjadi agenda utama Inspektorat Kota Sawahlunto. Saat ini Inspektorat Kota Sawahlunto sedang dalam tahap penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasan serta mensosialisasikan berbagai sarana yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dalam rangka menampung dan menindaklanjuti berbagai aduan dan aspirasi masyarakat.

2.3. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

Dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat berkoordinasi dan berkonsultasi baik dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah tingkat provinsi maupun BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Sehubungan dengan masih terbatasnya tenaga fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan tenaga fungsional Auditor pada Inspektorat Kota Sawahlunto, maka hingga saat ini Pemerintah Kota Sawahlunto dalam hal ini Inspektorat Kota Sawahlunto senantiasa mengupayakan pemenuhan akan kebutuhan tenaga fungsional tersebut. Sampai saat ini, telah ada 11 orang Pejabat Fungsional Auditor dan 13 orang Pejabat Fungsional P2UPD. Dengan upaya pemenuhan kebutuhan akan jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (P2UPD) diharapkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat dapat lebih mandiri, profesional dan akuntabel dalam melakukan pembinaan pengawasan terhadap Perangkat Daerah (PD) yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.

Selain tantangan di atas juga terdapat tantangan dan peluang terkait pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah Kota Sawahlunto yaitu pelaksanaan kebijakan strategis pemberantasan korupsi berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, yang merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemebgku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut tugas Pemerintah Daerah yang pertama adalah menjabarkan dan melaksanakan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi melalui aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan setiap tahun. Tugas Pemerintah Daerah yang kedua, adalah menyampaikan laporan pencapaian pelaksanaan aksi PPK

sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Dalam Negeri, maka Irjen Kemendagri mempunyai tujuan yaitu :

1. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2);
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Sasaran strategis daritujuan, yaitu :

1. Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:
 - a) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 - (2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 - (3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 - (4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni
 - b) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - (2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
- (4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
- (6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
- (8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
- (9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
- (10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

Adapun sasaran strategis yang merupakan derivasi daritujuan, yaitu :

1. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kementerian Dalam Negeri;
2. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah yang baik dengan dengan indikator Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah; dan
3. Pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan indikator Nilai Penegakan Integritas.

Sebagai bentuk pelaksanaan sasaran strategis dan Indikator Kegiatan Program (IKP) tersebut, maka Irjen Kemendagri telah menjabarkan ke dalam kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ibspektorat Jenderal, dengan sasaran “*Meninkatnya Koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas lintas Unit Kerja Lingkup Inspektorat Jenderal serta kualitas APIP di Daerah*”, dengan indikator kegiatan :

1. Jumlah Daerah yang difasilitasi Pembinaan teknis Inspektorat Jenderal;
2. Persentase penyelesaian dokumen monitoring dan evaluasi serta hasil- hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP;

3. Jumlah Daerah yang telah terbangun Konektivitas Sistem Informasi Pengawasan dengan Pemerintah Daerah;
4. Jumlah Auditor yang ditingkatkan kapasitasnya;
5. Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi.

Strategi sebagai pilihan cara dan arah yang akan ditempuh untuk mencapai arah kebijakan Inspektorat Jenderal selama jangka waktu 2020-2024 adalah :

1. Peningkatan kapasitas jabatan fungsional auditor Kementerian Dalam Negeri dan PPUPD secara nasional;
2. Penguatan kinerja Inspektorat Daerah;
3. Meningkatkan pengawasan internal dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. Meningkatkan komunikasi yang intensif dan membangun hubungan yang bersifat kemitraan dengan seluruh unit kerja dan pemerintah daerah;
5. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar APIP, aparat pengawasan lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta memberdayakan pengawasan masyarakat dalam pembangunan sistem pengawasan terpadu serta pencegahan penyimpangan;
6. Mengembangkan kapabilitas pengawasan dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur, proses bisnis/tata kelola, dukungan sarana dan prasarana pengawasan;
7. Menciptakan dan mengembangkan lingkungan pengendalian melalui penerapan manajemen risiko yang efektif;
8. Mengembangkan sistem teknologi dan informasi serta prosedur pengawasan yang memadai;
9. Meningkatkan intensitas dan efektivitas serta pemanfaatan hasil

pengawasan sebagai umpan balik (*feed back*) oleh pimpinan dalam perumusan kebijakan.

Dalam mewujudkan dan implementasi Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat adalah "Menjadi Propinsi Terkemuka Berbasis Sumber Daya Manusia yang Agamis pada Tahun 2025", Inspektorat Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Tujuan Jangka Menengah, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemda;
2. Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani.

Sasaran Tahunan Inspektorat Propinsi Sumatera Barat untuk kurun waktu tiga tahunan. Adapun sasaran tahunan yang merupakan derivasi daritujuan, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas Kapabilitas APIP;
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi;
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi.

3.2. Program Dan Kegiatan

Guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Sawahlunto 2018 - 2023, maka Inspektorat Kota Sawahlunto, pada tahun 2023 telah merencanakan sebanyak 3 Program dan 6 Kegiatan dan 18 Sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.944.981.210,- (enam milyar sembilan ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah), terdiri dari belanja operasi (belanja pegawai dan belanja barang jasa) sebesar Rp. 6.906.339.164,- (enam milyar sembilan ratus enam juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu seratus enam puluh empat rupiah),- dan belanja modal sebesar Rp. 38.642.046 ,- (tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu empat puluh enam rupiah), pagu dana ini sudah termasuk belanja Gaji ASN.

BAB IV **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program-program dan Kegiatan Prioritas dari Inspektorat Kota Sawahlunto tahun 2025.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2025 dan Prakiraan Maju tahun 2026
Kota Sawahlunto

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebuuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebuuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nilai SAKIP	SAWAHLUNTO	62,50	9.123.983.677	APBD		62,81	9.704.983.861
	Level PK APIP		Level 4	8.787.983.677	APBD		Level 4	9.352.163.861
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terfasilitasinya urusan Pemerintahan Daerah pada OPD Pengawasan		100%	8.787.983.677	APBD		100%	9.352.163.861
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan OPD (bulan)		100%	7.057.622.736	APBD		100%	7.410.503.873
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		43 orang	7.039.352.736	APBD		45 orang	7.391.320.373
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		12 Dokumen	12.600.000	APBD		12 Dokumen	13.230.000
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan	5.670.000	APBD		12 Laporan	5.953.500
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terfasilitasinya administrasi Kepegawaian (bulan)		48 orang	310.800.000	APBD		54 orang	326.340.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		29 orang	126.000.000	APBD		33 orang	132.300.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		9 orang	21.000.000	APBD		9 orang	22.050.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		10 orang	163.800.000	APBD		12 orang	171.990.000

Rencana Kerja Tahun 2026

BerAKHLAK
berakhlak melayani bangsa

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah (bulan)	4 paket, 50 Laporan	279.718.210	APBD	4 paket, 50 Laporan	283.704.120
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	5.250.000	APBD	1 Paket	5.512.500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	46.823.730	APBD	1 Paket	49.164.917
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	45.583.171	APBD	1 Paket	47.862.330
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	29.767.471	APBD	1 Paket	31.255.844
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 Laporan	152.293.838	APBD	50 Laporan	159.908.529
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penambahan peralatan dan mesin	33 unit	634.620.000	APBD	11 unit	633.632.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	330.000.000	APBD	1 unit	363.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	30 unit	120.810.000	APBD	8 unit	102.241.000
	- Laptop	1 unit	22.000.000	APBD	1 unit	24.200.000
	- PC	2 unit	33.000.000	APBD	2 unit	36.300.000
	- Printer	2 unit	6.800.000	APBD	2 unit	7.260.000
	- AC 1 PK	1 unit	7.260.000	APBD	1 unit	7.986.000
	- AC 2 PK	1 unit	10.450.000	APBD	1 unit	11.495.000
	- TV	-	-	APBD	1 unit	15.000.000
	- Dispenser	3 unit	3.000.000	APBD	-	-
	- Kursi	10 unit	16.500.000	APBD	-	-
	- Meja	10 unit	22.000.000	APBD	-	-
	- Vertikal blind	-	-	APBD	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	44.100.000	APBD	1 unit	46.305.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	18.900.000	APBD	1 unit	19.845.000

Rencana Kerja Tahun 2026



Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya fasilitas kebutuhan jasa kantor	48 Laporan	268 320 442	APBD	48 Laporan	281 736 464
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	5 512 500	APBD	12 Laporan	5 788 125
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	39 720 098	APBD	12 Laporan	41 706 103
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	7 714 469	APBD	12 Laporan	8 100 192
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	215 373 375	APBD	12 Laporan	226 142 044
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (bulan)	47 unit	236 902 289	APBD	49 unit	406 247 404
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Layanan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit	179 210 879	APBD	16 unit	188 171 423
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 unit	16 945 425	APBD	25 unit	17 792 696
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	APBD	1 unit	157 500 000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	30 245 985	APBD	1 unit	31 758 284
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	10 500 000	APBD	7 unit	11 025 000

Rencana Kerja Tahun 2026



	Persentase PD yang mendapat Nilai SAKIP minimal BB		100%	336 000 000	APBD		100%	352 800 000
	Level SPIP		3				3	
Program Penyelenggaraan Pengawasan	% pengawasan terlaksana sesuai PKPT		100%	199 500 000	APBD		100%	209 475 000
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pengawasan yang dilaksanakan		100%	173 250 000	APBD		100%	181 912 500
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah		50 Laporan	31 500 000	APBD		50 Laporan	33 075 000
Pengawasan Keuangan Pemda	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan		2 Laporan	21 000 000	APBD		2 Laporan	22 050 000
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		28 Laporan	15 750 000	APBD		28 Laporan	16 537 500
Reviu Laporan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		28 Laporan	10 500 000	APBD		28 Laporan	11 025 000
Pengawasan desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa		27 Laporan	52 500 000	APBD		27 Laporan	55 125 000
Kerja sama pengawasan internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		2 Kesepakatan	10 500 000	APBD		2 Kesepakatan	11 025 000
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		4 dokumen	31 500 000	APBD		4 dokumen	33 075 000
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan Tertentu yang dilaksanakan (%)		35	26 250 000	APBD		40	27 562 500
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		20	10 500 000	APBD		50	11 025 000
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		5	15 750 000	APBD		5	16 537 500

Rencana Kerja Tahun 2026



Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase peningkatan Skor IPAK (%)		3,75	136.500.000	APBD		3,80	143.325.000
	Persentase Rekomendasi Kebijakan yang disusun		3 Rekomendasi		APBD		5 Rekomendasi	
Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		3 Rekomendasi	15.750.000	APBD		5 Rekomendasi	16.537.500
Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		3 rekomendasi	10.500.000	APBD		4 Rekomendasi	11.025.000
Perumusan Kebijakan teknis di Bidang fasilitasi pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun		1 Rekomendasi	5.250.000	APBD		1 Rekomendasi	5.512.500
Pendampingan dan Asistensi	Persentase peningkatan Skor IPAK (%)		3,8				3,60	
	Meningkatnya Indeks PMPRB PD		B	120.750.000	APBD		BB	126.787.500
	Meningkatnya % Intervensi Pencegahan Korupsi terintegrasi Pemerintah Kota Sawahlunto		83%				85%	
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		28 PD	26.250.000	APBD		28 PD	27.562.500
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		28 PD	26.250.000	APBD		28 PD	27.562.500
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi		1 Kegiatan	52.500.000	APBD		1 Kegiatan	55.125.000
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		3 PD	15.750.000	APBD		3 PD	16.537.500

BAB V PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2025 ini disusun sebagai suatu dokumen perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Sawahlunto, Maret 2024
Inspektur Kota Sawahlunto,


ISNEDI, SE
NIP. 19641215 199003 1 003